



**“JARING KEMISKINAN MASYARAKAT PENJARING”
(STUDI ANALISIS PELANGGENGAN KEMISKINAN PESISIR DI INDONESIA
MENURUT TEORI RUANG LEFEBVRE DAN TEORI FUNGSI KEMISKINAN
GANS)**

Wahyudhia Zalpa MZ

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email : wahyudhia.zalpa.mz-2019@fisip.unair.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah luas lautnya mencapai 3,25 juta km². Hal ini menyebabkan Indonesia kaya akan sumber daya lautnya. Akan tetapi, berdasarkan data, nelayan justru menjadi salah satu pekerjaan paling miskin di Indonesia. Hal ini merupakan tragedi dimana seharusnya para nelayan Indonesia dapat hidup sejahtera mengingat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, tetapi mereka justru hidup dalam jaring kemiskinan. Studi-studi terdahulu menjabarkan bahwa kemiskinan di pesisir diakibatkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya faktor struktural. Tulisan ini merupakan studi literatur yang mengkaji tentang kemiskinan masyarakat pesisir dengan menekankan pada faktor struktural dan fungsionalis dari kemiskinan pesisir. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kemiskinan pesisir sebagai hal yang ‘sengaja’ diproduksi dan dilanggengkan oleh pemerintah. Teori produksi ruang Lefebvre dan fungsi kemiskinan yang dikemukakan Gans menjadi dua teori yang menjadi pedoman dalam menganalisis fenomena kemiskinan. Contoh kasus yang terjadi di kawasan pesisir Indonesia disajikan untuk memperkuat argumen pelanggaran kemiskinan ini. Kesimpulan dari tulisan ini adalah kemiskinan pesisir merupakan kemiskinan yang bersifat multidimensional. Kemiskinan di pesisir memberikan beberapa manfaat bagi kelompok lainnya. Program pembangunan yang dilakukan pemerintah justru banyak yang mengabaikan posisi masyarakat local. Rendahnya infrastruktur juga berperan besar dalam hal ini. Pemerintah yang seharusnya memberdayakan masyarakat pesisir justru seakan ‘sengaja’ mengisolasi mereka dan memanfaatkan mereka demi kepentingan kapitalis.

Kata Kunci: Kemiskinan Pesisir, Jaring Kemiskinan, Produksi Ruang, Fungsi Kemiskinan.

ABSTRACT

Indonesia is an archipelago country with a total sea area of 3.25 million km². This makes Indonesia rich in marine resources. However, based on data, fishermen are one of the poorest occupations in Indonesia. This is a tragedy where Indonesian fishermen should be able to live prosperously considering the wealth of natural resources they have, but instead, they live in a web of poverty. Previous studies have explained that poverty in coastal areas is caused by various factors, one of which is structural factors. This paper is a literature study that examines the poverty of coastal communities by emphasizing the structural and functionalist factors of coastal poverty. This paper aims to explain coastal poverty as something that is 'deliberately' produced and perpetuated by the government. Lefebvre's theory of spatial production and Gans' function of poverty are two theories that serve as guidelines in analyzing the phenomenon of poverty. Case examples that occur in Indonesia's coastal areas are presented to strengthen the

argument about the perpetuation of poverty. This paper concludes that coastal poverty is a multidimensional poverty. Coastal poverty provides several benefits for other groups. Many development programs carried out by the government ignore the position of local communities. The lack of infrastructure also plays a big role in this. The government, which is supposed to empower coastal communities, seems to 'deliberately' isolate them and utilize them for capitalist interests.

Keywords: *Coastal Poverty, Web of Poverty, Spatial Production, The Function of Poverty.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim. Kekayaan maritim Indonesia seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya dan makmur. Akan tetapi, realitanya justru sebaliknya. Hal ini terlihat dari trend penurunan jumlah nelayan di Indonesia. Berdasarkan data statistik sumber daya laut dan pesisir 2021 tercatat bahwa pada tahun 2010 jumlah nelayan di Indonesia adalah sebesar 2.16 juta jiwa, tetapi pada tahun 2019 jumlah ini berkurang menjadi 1.83 juta jiwa. Hal ini berarti terdapat penurunan sekitar 330.000 jiwa¹. Data lain yang dikemukakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menunjukkan penurunan jumlah nelayan budidaya yang cukup signifikan. Pada tahun 2012, jumlah nelayan budidaya mencapai 4,6 juta jiwa. Namun, angka ini terus turun hingga pada tahun 2020, jumlah nelayan budidaya hanya mencapai 2,2 juta jiwa². Penurunan jumlah nelayan ini disebabkan oleh banyak faktor. Terlepas dari hal tersebut, sangat disayangkan bahwa Indonesia yang terkenal dengan kemaritimannya ini justru lemah dalam pemanfaatan kemaritiman.

Negara Indonesia hakikatnya merupakan 'negara penjaring'. Negara yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas perairan. Akan tetapi, dalam realitasnya saat ini sektor penjaring justru terjaring kemiskinan. Sektor yang seharusnya menjadi mata pencaharian utama dan pembawa kesejahteraan bagi masyarakat justru menjadi sektor yang identik dengan kemiskinan. Berdasarkan data survei sosio ekonomi nasional (SUSENAS) pada tahun 2017 menunjukkan nelayan sebagai salah satu profesi paling miskin di Indonesia³. Data lain oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 juga menunjukkan bahwa dari 2,7 juta jumlah nelayan pada waktu itu, mayoritas di antaranya berada dalam ambang kemiskinan, dan menyumbang 25% angka kemiskinan nasional⁴. Hal ini menjadi suatu ironi dimana negara yang kaya akan potensi kelautannya justru termiskinkan olehnya.

Studi-studi terdahulu mengemukakan berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan masyarakat 'penjaring' atau pesisir. Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Mita Natalia dan Muhammad Mukti Alie⁵ di salah satu kawasan pesisir Semarang menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan pesisir, yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah, kondisi infrastruktur yang buruk, kepemilikan modal yang rendah, penguasaan dan pemanfaatan terhadap teknologi yang rendah, kerusakan sumber daya alam, dan gaya hidup masyarakat. Studi lain yang dilakukan oleh Karjani Dt. Maani, Aldri Firmaldi, dan Hidayatul Fajri⁶ juga menunjukkan bahwa kemiskinan pesisir juga disebabkan terisolasinya masyarakat. Masyarakat mengalami kesulitan dalam hal aksesibilitas beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk dapat berkembang. Beberapa studi terdahulu tersebut, memperlihatkan bagaimana permasalahan kemiskinan di pesisir ini merupakan permasalahan multidimensi. Program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah pun masih belum dapat berjalan secara efektif untuk mengentaskan permasalahan ini.

Jaring kemiskinan masyarakat penjaring di Indonesia seakan menjadi suatu perangkap yang disengaja. Kemiskinan masyarakat pesisir seakan menjadi suatu hal yang lumrah dan bahkan seakan berusaha dilanggengkan. Hal ini menjadi suatu isu yang menarik untuk dianalisis. Studi-studi terdahulu cenderung membahas faktor dan disfungsi dari kemiskinan pesisir. Akan tetapi, kemiskinan yang sering diidentikkan dengan disfungsi ini memiliki sisi fungsionalitasnya. Hal ini sebagaimana

yang dikemukakan oleh Herbert J. Gans dalam teorinya terkait fungsi kemiskinan. Tulisan ini dengan menggunakan teori Gans berusaha menganalisis sisi fungsionalitas dari kemiskinan masyarakat penjarang ini yang mana hal ini seakan menyebabkan masyarakat miskin penjarang ini sengaja dilanggengkan. Teori lain yang digunakan dalam menganalisis fenomena pelanggaran ini adalah teori ruang Lefebvre guna melihat bagaimana konsepsi makna terkait pesisir yang saat ini seringkali justru terkenal sebagai kawasan miskinnya. Kedua hal tersebut menjadi fokus dalam studi ini, yaitu bagaimana analisis kemiskinan di kawasan pesisir menurut teori ruang Lefebvre dan teori fungsi kemiskinan Gans. Sudut pandang dan teori yang digunakan dalam tulisan ini menjadi suatu kebaruan dan posisi tersendiri dari studi ini dibanding dengan studi-studi terdahulu yang telah dilakukan. Studi ini diharapkan dapat menambah memberikan sumbangsih akademis dalam literatur terkait studi kemiskinan khususnya terkait sisi fungsional dari kemiskinan. Tulisan ini merupakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data melalui literatur-literatur yang telah ada sebelumnya guna menjadi bahan pembantu analisis fenomena pelanggaran jaring kemiskinan masyarakat penjarang di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan studi literatur. Data dalam studi ini merupakan data sekunder. Studi ini mengumpulkan berbagai informasi dan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel berita, dan lainnya. Berdasarkan data tersebut, penulis melakukan analisis terhadap data dengan teori yang digunakan. Selain itu, tulisan ini juga didasarkan pada fenomena kemiskinan pesisir yang penulis observasi secara langsung di beberapa tempat. Hal ini membuat peneliti dapat memahami topik yang dibahas dalam tulisan ini.

C. LANDASAN TEORI

Teori Ruang Henri Lefebvre

Henri Lefebvre adalah seorang filsuf kelahiran Perancis tahun 1901. Lefebvre memperkenalkan konsep produksi ruang sosial. Lefebvre menjelaskan bahwa ruang (ruang sosial) adalah hasil dari produksi sosial yang dilakukan oleh kapitalis. Produksi ruang adalah bagaimana kepentingan kapitalis berpengaruh terhadap tujuan dari penciptaan ruang. Penciptaan ruang atas dasar kapitalis ini yang kemudian menurut Lefebvre telah menghilangkan arti sebenarnya dari 'ruang publik'. Ruang publik adalah wadah bagi masyarakat umum untuk melakukan aktivitasnya⁷. Ruang publik sendiri idealnya dapat diakses oleh masyarakat tanpa memandang adanya perbedaan kelas sehingga, semua lapisan bisa menikmatinya. Akan tetapi, berdasarkan pendapat Lefebvre, ruang publik saat ini sudah berubah maknanya menjadi suatu produk sosial yang diciptakan oleh para kapitalis.

Lefebvre mengemukakan tiga dimensi analisis yang dapat membantu dalam menjelajah dan memahami kompleksitas ruang (*spatial triad*)⁸, yaitu

- a. Praktik spasial (*spatial practices*), yang merujuk pada dimensi material dan aktivitas yang terjadi di suatu ruang. Dimensi analisis ini merupakan dimensi yang dapat dirasakan secara nyata (fisik). Selain itu, dimensi ini juga menyangkut tentang kegiatan sosial dan interaksi yang terjadi antar ruang. Leary (2009) menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam praktik spasial ini. Pertama adalah lingkungan material (*material environment*) yang berarti adanya ruang yang benar-benar ada dan dapat dirasakan. Kedua adalah adanya kegiatan yang rutin dilakukan dalam ruang tersebut (*daily routine*). Ketiga adalah proses sosial-ekonomi yang terjadi dalam pembentukan ruang dalam bahasa teori Lefebvre ini dimaksudkan dengan adanya interaksi dengan dua aspek lainnya dalam *spatial triad*. Praktik spasial merupakan dimensi yang dapat terlihat (*perceived place*) dengan nyata dan jelas.

- b. Representasi ruang (*representations of space*) membahas tentang bagaimana konsep ruang yang dibentuk oleh pembuatnya, seperti arsitektur, insinyur, perencana pembangunan, dan sejenisnya. Ruang representasi merupakan wacana dari suatu ruang⁹. Ruang representasi memiliki kontribusi yang kuat dalam membentuk praktik spasial. Ruang representasi adalah konseptualisasi atau pendefinisian dari suatu ruang (*conceived*) yang dilakukan oleh para pembuat ruang tersebut. Pengetahuan, ideologi, perasaan yang dianut oleh pembuat ruang sangat berpengaruh pada definisi dan konsep ruang yang diciptakan (*mental space*). Representasi ruang ini membentuk adanya “*silent users*”. *Silent users* adalah penduduk atau penghuni ruang tersebut yang tidak memiliki kekuasaan atas ruang sehingga, pengetahuan dan pengalaman yang dihasilkan dalam ruang tersebut tidaklah bebas dan hanya menuruti hasil konsep ruang yang diciptakan oleh pembuat ruang.
- c. Ruang representasi (*representational space*) merupakan kehidupan sosial dan bagaimana proses produksi-reproduksi makna dan pengalaman sosial oleh para penduduknya. Ruang representasi adalah wadah tempat berlangsungnya kehidupan sosial. Dimensi ini adalah ruang yang ditinggali dan dihidupi oleh para penduduknya (*lived space*). Pada ruang representasi ini kultur sudah masuk dan bercampur dalam ruang. Dalam dimensi ini pemaknaan terhadap ruang baik secara general dan personal dapat berbeda sehingga, menghasilkan pengalaman yang berbeda dalam suatu ruang.

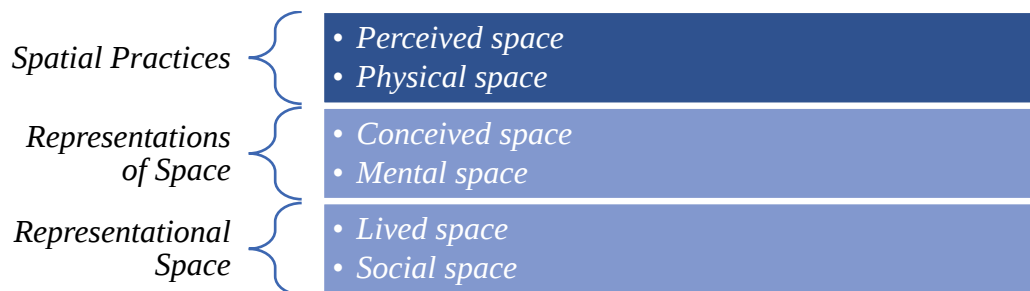


Diagram 1. Kerangka pemikiran teori produksi ruang Lefebvre (Walet, 2014)

Teori Fungsi Kemiskinan Herbert J. Gans

Herbert J. Gans merupakan salah satu tokoh sosiologis yang lahir pada tahun 1927. Salah satu karya Gans yang paling terkemuka adalah pemikirannya terkait fungsi kemiskinan. Teori fungsi kemiskinan yang dikemukakan oleh Gans berangkat dari pemikiran Merton mengenai fungsi. Gans melalui pemikiran Merton mencoba menjadikannya sebagai sudut pandang baru dalam mengkaji permasalahan kemiskinan yang mana pada studi-studi sebelumnya cenderung berfokus pada sisi disfungsi kemiskinan. Gans melalui teorinya ini menjabarkan kemiskinan dari cara pandang baru, yaitu fungsi kemiskinan. Menurut Gans, terdapat 15 fungsi kemiskinan¹⁰, yaitu

- Kemiskinan membuat ‘pekerjaan-pekerjaan kotor’ di masyarakat dapat terselesaikan.
- Kemiskinan mensubsidi beberapa kegiatan, sehingga dapat menguntungkan kelompok kaya.
- Kemiskinan menciptakan lapangan pekerjaan baru di beberapa sektor yang berhubungan dengan kelompok miskin.
- Kelompok miskin menjadi pembeli barang yang tidak laku di pasaran.
- Kelompok miskin dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai pelanggar hukum, pembuat onar, dan menjadi bahan sosialisasi ke masyarakat.
- Kelompok miskin dideskripsikan sebagai kelompok yang tidak berdaya, bernasib buruk, bermasalah, dan lainnya. Hal ini menyebabkan kelompok lain berusaha membantu kelompok miskin. Bantuan yang diberikan oleh kelompok lain ini membuat kelompok lain ini merasa menjadi ‘orang baik’ yang altruistik, dan bermoral.
- Kelompok miskin memberikan alasan untuk melakukan perilaku menyimpang. Hal ini menyebabkan kelompok lain menirunya.

- h. Adanya kelompok miskin membuat adanya kepastian dalam status sosial di masyarakat.
- i. Membantu mobilitas kelompok yang berada di atas kelompok miskin (kelompok menengah).
- j. Membantu kelompok kaya dan pemerintah dalam pekerjaannya. Kelompok miskin menjadi sasaran perbuatan amal dan baik yang dilakukan oleh kelompok kaya dan pemerintah. Perbuatan tersebut dapat membangun citra mereka di masyarakat.
- k. Orang miskin berkontribusi secara kultural dalam penciptaan peradaban. Peran orang miskin dalam hal ini adalah pemasok tenaga kerja konstruksi untuk monumen-monumen bersejarah.
- l. Orang miskin turut berkontribusi dalam kultur masyarakat yang mana kultur tersebut turut dinikmati oleh kelompok lainnya. Contohnya budaya *thrift shop* yang saat ini juga menjadi trend dikalangan kelompok kaya.
- m. Kelompok miskin dijadikan sebagai korban untuk memenuhi beban perubahan zaman. Kelompok miskin seringkali dipekerjakan sebagai pembangun suatu fasilitas kota, akan tetapi setelah fasilitas itu jadi dan dinikmati masyarakat, kelompok miskin tidak dapat ikut menikmatinya dan cenderung diusir darinya.
- n. Kelompok miskin ikut membantu proses politik. Kelompok miskin menjadi ladang suara yang cukup besar dalam pemilu.
- o. Kelompok miskin dapat menjadi bahan sosialisasi ke masyarakat (sebagai penegak kaidah konvensional). Kelompok miskin sering dijadikan bahan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kaidah-kaidah konvensional.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan Pesisir dalam Produksi Ruang Henri Lefebvre

Henri Lefebvre mengemukakan teori terkait produksi ruang sosial. Teori tersebut menjelaskan tentang bagaimana ruang sengaja dibentuk oleh kapitalis untuk kepentingannya. Lefebvre menjelaskan tiga dimensi analisis dalam teorinya, yaitu praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasi. Fenomena pelanggaran kemiskinan pesisir jika dilihat melalui kaca mata teori ini, maka daerah pesisir merupakan kawasan yang sengaja dibentuk oleh kapitalis untuk kepentingan kapitalistiknya. Produksi ruang sosial ini menurut Lefebvre memiliki tiga dimensi analisis, yaitu pertama praktik spasial. Praktik spasial dalam penciptaan kawasan pesisir berarti bahwa kawasan pesisir merupakan kawasan yang secara fisik dapat dirasakan melalui panca indra, terdapat bentuk riil dari ruang pesisir ini. Selain itu, juga terdapat kegiatan yang rutin dilakukan di kawasan ini, yaitu melaut dan budidaya ikan.

Dimensi kedua dalam teori produksi ruang Lefebvre adalah representasi ruang. Representasi ruang dalam kawasan pesisir berarti pemerintah secara sengaja menciptakan kawasan pesisir sebagai suatu kawasan berkumpulnya kelompok miskin. Hal ini menyebabkan para penduduk kawasan pesisir hanya dapat menjadi *silent users* yang secara pasif mengikuti konseptualisasi yang ada di mana kawasan pesisir. Pada aspek ini dapat dilihat dari bagaimana realisasi pemerintah dalam melakukan pembangunan di kawasan pesisir. Mayoritas studi terkait kemiskinan di wilayah pesisir menunjukkan bahwa rendahnya infrastruktur menjadi salah satu penyebab utama dari kemiskinan pesisir. Hal ini menyebabkan kawasan pesisir menjadi kawasan yang terisolasi dari dunia luar. Beberapa contoh dari rendahnya infrastruktur ini dapat dilihat dari banyaknya akses jalan rusak di daerah pesisir. Wakil ketua DPRD Riau, Hardianto menyatakan bahwa banyak jalan di kawasan pesisir yang kondisinya memprihatinkan¹¹. Hal serupa juga disampaikan oleh BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) Aceh yang menyatakan bahwa banyak jalan di daerah pesisir Aceh mengalami kerusakan, dan beberapa di antaranya masuk dalam kategori kerusakan parah¹². Banyak kawasan pesisir yang bahkan belum dialiri listrik. Berdasarkan laporan tahun 2013, sebanyak 96 kampung di kawasan Pesisir Selatan, Sumatera Barat belum mendapat aliran listrik¹³. Nasib sama juga dialami oleh kawasan Pesisir Timur, Sumatera Selatan. Mereka selain sulit mendapatkan akses listrik, juga mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih¹⁴.

Kondisi beberapa wilayah pesisir di Indonesia ini merepresentasikan rendahnya kondisi infrastruktur di kawasan pesisir. Selain pembangunan yang dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur ini masih belum terjadi secara menyeluruh, dan bahkan beberapa diantaranya hanya menjadi wacana yang telah mangkrak selama bertahun-tahun.

Pembangunan wilayah pesisir oleh pemerintah seringkali mengabaikan masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan pembangunan yang dilakukan tidak berjalan secara efektif dan justru menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat lokal. Sekretaris Jenderal KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Susan Herawati menjabarkan bahwa masifnya pembangunan yang terjadi di kawasan pesisir Indonesia, sering kali tidak memberdayakan masyarakat pesisir, justru merampas hak mereka. Susan menjelaskan bahwa pada tahun 2018 terjadi proyek reklamasi di 41 titik, proyek pertambangan di 25 titik, proyek pariwisata, proyek kawasan perkebunan di pesisir, dan masih banyak lagi. Proyek-proyek ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Susan menyatakan beberapa proyek-proyek tersebut menimbulkan dampak bagi masyarakat lokal. Proyek reklamasi sepanjang tahun 2018 telah mengakibatkan 747.363 kepala keluarga terdampak¹⁵. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Alda Febrianti (2022) menunjukkan bagaimana persepsi dari masyarakat pesisir di Kota Polopo, Sulawesi Selatan terkait proyek reklamasi kawasan pesisir di daerah tersebut. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, ditemukan bahwa banyak penduduk yang tidak setuju akan adanya proyek reklamasi tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat khawatir akan adanya penggusuran dan penghambatan aktivitas nelayan mereka. Mereka meyakini bahwa reklamasi justru akan merenggut mata pencaharian mereka sebagai nelayan, dan akan berdampak buruk juga bagi lingkungan pesisir¹⁶. Selain itu, proyek pertambangan juga mengakibatkan sebesar 33.000 kepala keluarga terdampak. KIARA juga mencatat bahwa pada 2018 sebanyak 79 pulau-pulau kecil berstatus sebagai pulau privat. Privatisasi pulau atas dasar pariwisata ini menyebabkan ruang lingkup para nelayan dalam mencari tangkapan ikan menyempit. Contoh lain terkait sektor pariwisata ini adalah proyek KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) yang terjadi di kawasan Mandalika, NTB dan Labuan Bajo, NTT menyebabkan 300 keluarga nelayan di Mandalika, dan 1700 keluarga nelayan di Labuan Bajo terusir dari wilayah tempat tinggal pesisirnya²². Kasus serupa juga dialami oleh 159 masyarakat pesisir Pantai Merpati, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 31 Januari 2022, mereka mengalami penggusuran dari tempat tinggal mereka dengan alasan adanya proyek revitalisasi pesisir. Nasib mereka hingga saat ini masih abu-abu. Mereka belum mendapatkan ganti rugi atau setidaknya tindakan relokalisasi ke tempat yang layak. Mata pencaharian mayoritas penduduk sebagai pemulung rumput laut juga ikut tergerus. Masyarakat dikarenakan penggusuran tersebut kini hidup dalam ketidakpastian. Mereka tidak memiliki kepastian tempat tinggal dan juga mata pencaharian¹⁷.

Berdasarkan ilustrasi dan contoh kasus yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dilihat bagaimana banyaknya kawasan pesisir yang memiliki kondisi infrastruktur yang rendah, bahkan masuk dalam kategori mengkhawatirkan. Rendahnya infrastruktur ini menyebabkan masyarakat pesisir terisolasi dan juga terhambat dalam aktivitasnya pengembangannya. Proyek pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah justru banyak yang merenggut hak dan kehidupan masyarakat pesisir. Koordinator Nasional DFW (*Destructive Fishing Watch*), Mohamad Abdi Suhufan mengatakan bahwa pembangunan fisik di kawasan pesisir masih terlalu jauh perkembangannya¹⁸. Rendahnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir ini jika dilihat dengan teori ruang Lefebvre merupakan bentuk 'kesengajaan' pemerintah. Pemerintah sengaja memperlambat pembangunan kawasan pesisir, dan mengisolasi masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir dalam hal ini hanya menjadi *silent users* yang terpaksa harus menaati bagaimana pemerintah mengelola ruang yang mereka gunakan. Masyarakat pesisir yang terdampak dari proyek pembangunan tidak dapat bertindak apa-apa saat mereka dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka hanya menjadi aktor pasif

dan hanya mengikuti perintah pemerintah, meskipun perintah tersebut jelas merugikan mereka.

Dimensi terakhir adalah ruang representasi. Hal ini mencangkup kehidupan sosial dan proses produksi-reproduksi makna dilakukan. Bagi kelompok lain mungkin makna yang tercipta ketika mendengar kata pesisir adalah suatu kawasan pinggir pantai yang seringkali dihuni oleh masyarakat miskin. Akan tetapi, makna ini dapat berbeda bagi penduduk kawasan pesisir dimana bagi mereka kawasan tersebut merupakan tempat tinggal dan tempat kerja mereka. Survei yang dilakukan oleh Satker PKP (Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman), Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di Kalimantan Utara menunjukkan bahwa kawasan kumuh didominasi oleh wilayah pesisir¹⁹. Hal ini merepresentasikan bagaimana ruang representasi dari kawasan pesisir yang dimaknai sebagai kawasan kumuh dan miskin. Proses produksi dan reproduksi makna ini secara ironi juga dapat berkaitan dengan budaya kemiskinan masyarakat pesisir. Pada dimensi ini di masyarakat pesisir telah terjadi pewarisan nilai dan norma, termasuk tentang bagaimana masyarakat memaknai pendidikan. Rendahnya kesadaran akan pendidikan dan didukung dengan kondisi yang terisolasi menyebabkan masyarakat pesisir cenderung memiliki pendidikan yang rendah dan hal ini menjadi salah satu penyebab pelanggaran kemiskinan. Bagi masyarakat pesisir, mereka lebih memilih mempekerjakan anak-anak mereka untuk turut menambah penghasilan daripada harus menyekolahkan mereka tinggi-tinggi. Studi yang dilakukan pada masyarakat pesisir Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan oleh Wahyu, dkk (2016)²⁰ menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat pesisir di Kabupaten Tanah Laut hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SD. Mayoritas kedua juga hanya sampai pada jenjang SMP. Hal serupa juga dikemukakan oleh studi Christiawan & Budiarta (2017)²¹ di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Studi tersebut juga menunjukkan mayoritas masyarakat pesisir hanya menempuh pendidikan hingga sekolah dasar.

Fungsi Kemiskinan Pesisir

Herbert J. Gans memandang keberfungsian kemiskinan dalam sistem di masyarakat. Kemiskinan pesisir menurut sudut pandang teori Gans memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai kawasan yang berisi sumber daya manusia yang mau untuk melakukan pekerjaan yang dianggap kotor di masyarakat. Pekerjaan kotor dalam konteks ini merupakan pekerjaan sebagai nelayan. Hal ini dikarenakan pekerjaan sebagai nelayan harus senantiasa berkotor-kotoran dengan air dan ikan. Hal ini menjadikan pekerjaan nelayan ini kurang diminati oleh masyarakat dan cenderung 'diberikan' kepada masyarakat miskin untuk dikerjakan. Berdasarkan data yang telah dikemukakan sebelumnya, nelayan merupakan salah satu bentuk pekerjaan paling miskin. Ketidakpastian hasil yang diperoleh oleh nelayan membuat pendapatan nelayan juga selalu rawan. Pendapatan yang didapatkan oleh nelayan ini juga tidak sebanding dengan usaha mereka melaut dan bertani ikan. Fungsi lain dari kemiskinan pesisir adalah sebagai kawasan penyubsidi kegiatan perikanan yang dapat menguntungkan kelompok kaya. Hal ini hampir sama dengan fungsi pertama dimana pada fungsi kedua ini, kawasan kemiskinan pesisir merupakan tempat berkumpulnya para sumber daya manusia yang murah untuk diupah. Hal ini dapat terlihat bahwa kawasan miskin pesisir mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan kecil atau hanya sebagai buruh nelayan. Nelayan-nelayan tersebut kemudian menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak atau pengepul dengan harga yang murah. Hal ini dikarenakan nelayan tidak memiliki posisi tawar yang tinggi untuk melakukan proses tawar-menawar harga. Ketimpangan yang terjadi ini menyebabkan upah yang diterima nelayan dari hasil melautnya cenderung sangat kecil dan bahkan di bawah angka rata-rata kemiskinan nasional.

Tengkulak atau pengepul merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang tercipta dari adanya kawasan pesisir. Tengkulak atau pengepul yang memperantarai proses distribusi dan jual-beli ikan dari nelayan kepada pengusaha atau kepada pasar masyarakat. Tanpa adanya kawasan pesisir, maka pekerjaan sebagai tengkulak atau

pengepul ikan ini tidak akan ada. Fungsi lain dari adanya masyarakat pesisir ini adalah kelompok ini membantu mobilitas kelompok yang berada di atasnya. Kelompok miskin pesisir membantu tengkulak untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal. Tengkulak memiliki posisi tawar yang cukup menjanjikan di pasar, maka tengkulak dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar. Hal ini membuat tengkulak dapat menaikkan status ekonominya. Keberadaan tengkulak ini memiliki dualisme, di satu sisi tengkulak diperlukan untuk mengumpulkan hasil tangkapan atau ternak dari para nelayan kecil dan menjamin produk yang akan dijual kepada perusahaan. Akan tetapi, di sisi lain posisi tawar nelayan terhadap tengkulak ini rendah. Nelayan tidak memiliki posisi tawar yang kuat dikarenakan nelayan tidak mengetahui harga pasar secara pasti, kesulitan dalam mendistribusikan, dan faktor lainnya. Kelembagaan nelayan juga tidak berjalan dengan baik, padahal jika kelembagaan nelayan ini berfungsi nelayan dapat menaikkan posisi tawar nelayan. Posisi tawar nelayan yang rendah ini juga sesuai dengan studi Maulidah, dkk (2022)²² yang menyatakan rendahnya posisi nelayan. Posisi nelayan dan tengkulak ini juga seakan membentuk hubungan patron klien. Nelayan sering kali berhutang kepada tengkulak untuk memenuhi biaya operasional melaut. Hal tersebut memperkuat posisi tengkulak dalam mempermainkan harga. Hal ini dikemukakan oleh beberapa nelayan di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta yang mengatakan bahwa sering kali mereka terpaksa untuk berhutang kepada para tengkulak, dikarenakan keterbatasan modal. Hal ini membuat para nelayan tersebut tidak dapat menentukan harga dan hanya menuruti harga yang dipatok oleh tengkulak²³.

Masyarakat miskin pesisir merupakan pasar yang prospektif untuk membeli barang-barang yang tidak laku atau barang miskin. Masyarakat miskin dapat menjadi konsumen atau pembeli dari produk yang tidak laku di pasaran. Masyarakat pesisir yang miskin tidak memiliki sumber daya untuk dapat memiliki pilihan yang luas untuk mengonsumsi sesuatu. Hal ini menyebabkan mereka senantiasa hanya membeli produk-produk murah yang ada di pasaran. Produk-produk murah ini seringkali merupakan 'sisa' atau barang yang tidak laku di pasaran. Fungsi lain dari kemiskinan pesisir adalah kemiskinan pesisir menciptakan suatu kultur yang juga dinikmati oleh kelompok lainnya. Dalam hal ini kelompok pesisir menciptakan suatu kultur bagi kelompok lainnya untuk memancing, berwisata ke pantai, berwisata di kawasan budidaya ikan, dan lainnya. Hal-hal tersebut sejatinya merupakan aktivitas kultur sehari-hari masyarakat pesisir yang kemudian menjadi suatu kultur juga bagi kelompok lainnya, terutama bagi kelompok kaya sebagai suatu kegiatan untuk menikmati waktu senggang mereka. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wisata di kawasan pesisir, dan banyaknya pembangunan pesisir yang mengarah pada sektor wisata. Berdasarkan data *European Economy* (1998), 63% wisatawan di Eropa lebih memilih pantai sebagai destinasi wisata. Indonesia sebagai negara kepulauan berpengaruh terhadap panjangnya garis pantai yang dimiliki. Hal ini menunjukkan potensi wisata pesisir di Indonesia²⁴.

Kemiskinan pesisir memberikan kepastian dalam status sosial di masyarakat. Kelompok miskin masyarakat pesisir memberikan kepastian bagi kelompok lainnya bahwa mereka bukan merupakan kelompok miskin. Selain itu, fungsi ini juga mengarah ke fungsi selanjutnya dimana kawasan pesisir menjadi wadah bagi kelompok lainnya untuk menunjukkan sisi altruistik dan perilaku prososialnya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kelompok miskin kawasan pesisir menjadi tempat bagi kelompok lainnya untuk dapat merasa menjadi 'orang yang baik dan berguna'. Fungsi lain dari kemiskinan pesisir adalah kelompok ini menjadi ladang bagi para politisi untuk mendapatkan suara atau dukungan. Hal ini berkorelasi dengan fungsi selanjutnya, yaitu sebagai tempat bagi pemerintah dan beberapa pihak untuk melakukan perbuatan filantropinya dan untuk membangun citra baik di masyarakat. Berdasarkan data yang telah dikemukakan sebelumnya, dari 7,87 juta penduduk miskin yang ada di desa, 25% di antaranya adalah masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan kecil¹⁵. Angka penduduk miskin pesisir ini cukup besar untuk mengumpulkan suara bagi para politisi saat pemilu. Hal ini menyebabkan kelompok ini menjadi sasaran bagi para politisi untuk membangun citranya. Fungsi terakhir dari kemiskinan pesisir adalah kemiskinan pesisir menjadi

bahan sosialisasi ke masyarakat. Hal ini dikarenakan kawasan pesisir sudah identik dengan kemiskinannya, maka hal ini menjadi suatu bahan untuk disosialisasikan ke masyarakat dimana masyarakat diharapkan jangan sampai menjadi seperti mereka. Masyarakat disosialisasikan untuk bekerja keras agar tidak menjadi bagian dari kelompok miskin pesisir. Beberapa hal tersebut merupakan beberapa fungsi kemiskinan kawasan pesisir. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan sisi fungsionalitas dari kemiskinan pesisir.

E. KESIMPULAN

Masyarakat penjarang atau masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang identik sebagai kelompok miskin. Masyarakat ini bukan menjaring justru terjaring oleh perangkap kemiskinan. Hal ini yang menjadikan masyarakat ini senantiasa terpuruk dalam kemiskinan. Kemiskinan masyarakat penjarang ini jika ditinjau dari sudut pandang fungsionalis menggunakan teori fungsi kemiskinan Gans menunjukkan adanya beberapa fungsi kemiskinan dari kemiskinan yang menimpa masyarakat penjarang ini. Fungsi-fungsi tersebut yang kemudian menjadi alasan dan bahan untuk seakan melegitimasi pelanggaran kemiskinan di kawasan ini. Teori produksi ruang Lefebvre juga mendukung kesengajaan dari keberadaan kawasan miskin masyarakat penjarang ini dimana kawasan pesisir memang dengan sengaja dibentuk sedemikian rupa untuk memberikan fungsi bagi kelompok lainnya. Dialektika yang terjadi pada masyarakat penjarang yang justru dimiskinkan oleh sistem yang menyebabkan mereka miskin di laut yang kaya. Diperlukan upaya sinergis dari pemerintah. Pembangunan berparadigma *people centered* dan *bottom up* perlu diterapkan dalam mengakaji permasalahan ini. Hal tersebut diperlukan guna menciptakan solusi yang berkelanjutan sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir agar mampu mandiri dalam menghadapi permasalahan-permasalahan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] WALHI. (2022, April 6). *Jumlah Nelayan di Indonesia Terus Menurun Akibat Krisis Iklim dan Industri Ekstraktif*. Diambil kembali dari [www.walhi.or.id: https://www.walhi.or.id/jumlah-nelayan-di-indonesia-terus-menurun-akibat-krisis-iklim-dan-industri-ekstraktif#:~:text=Jumlah%20nelayan%20di%20Indonesia%20terus%20mengalami%20penurunan%20dalam%20satu%20dekade,tercatat%20hanya%201.83%20juta%20orang](https://www.walhi.or.id/jumlah-nelayan-di-indonesia-terus-menurun-akibat-krisis-iklim-dan-industri-ekstraktif#:~:text=Jumlah%20nelayan%20di%20Indonesia%20terus%20mengalami%20penurunan%20dalam%20satu%20dekade,tercatat%20hanya%201.83%20juta%20orang).
- [2] Annur, C. (2022, Agustus 5). *Jumlah Nelayan Budidaya di Indonesia Merosot 10,44% pada 2020*. Diambil kembali dari [databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/jumlah-nelayan-budidaya-di-indonesia-merosot-1044-pada-2020](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/jumlah-nelayan-budidaya-di-indonesia-merosot-1044-pada-2020)
- [3] Anna, Z. (2020, Mei 15). *Nelayan memang miskin, tapi riset buktikan mereka tetap bahagia*. Diambil kembali dari [theconversation.com: https://theconversation.com/nelayan-memang-miskin-tapi-riset-buktikan-mereka-tetap-bahagia-136496](https://theconversation.com/nelayan-memang-miskin-tapi-riset-buktikan-mereka-tetap-bahagia-136496)
- [4] Anwar, Z., & Wahyuni. (2019). Miskin Di Laut yang Kaya: Nelayan Indonesia dan Kemiskinan. *Sosioreligius*, Vol.1, No. IV, 52-60.
- [5] Natalia, M., & Alie, M. (2014). KAJIAN KEMISKINAN PESISIR DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok). *Jurnal Teknik PWK*, Vol. 3, No. 1, 50-59.
- [6] Maani, K., Firnaldi, A., & Fajri, H. (2018). Fisherman Empowerment and Poverty in Pesisir Selatan Regency. *MATEC Web of Conferences* 229, `1-7.
- [7] Lake, R., Dwisusanto, Y., Purbadi, Y., & Arinto, F. (2020). Fenomena The Sacred Public Space berdasarkan Teori Lefebvre "The Production of Space" Studi Kasus: Ruang Publik Kota Larantuka sebagai Citra Kota Reinha Rosari. *Arcade Jurnal Arsitektur*, 85-93.

-
- [8] Walet, L. (2014). Negotiating the Production of Space: The Implementation of Rewilding in North-East Portugal. *MSc Thesis Wageningen University*, 19-24.
- [9] Mahaswara, H. (2016). Menggugat Ruang Publik Melalui Gerakan Masyarakat (Studi Kasus Gerakan Warga Berdaya di Yogyakarta) . *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 26-39.
- [10] Gans, H. (1972). The Positive Functions of Poverty . *American Journal of Sociology*, Vol. 78, No. 2, 275-289.
- [11] Syafni, D. (2021, November 19). *Jalan lintas pesisir di Riau banyak yang rusak*. Retrieved from [riau.antaranews.com: https://riau.antaranews.com/berita/248401/jalan-lintas-pesisir-di-riau-banyak-yang-rusak](https://riau.antaranews.com/berita/248401/jalan-lintas-pesisir-di-riau-banyak-yang-rusak)
- [12] Luwi, A. (2022, Desember 28). *BPJN Aceh Segera Perbaiki Jalan Rusak di Wilayah Aceh Pesisir, Penanganan Jalan Ambas Program 2023*. Retrieved from [aceh.tribunnews.com: https://aceh.tribunnews.com/2022/12/28/bpjn-aceh-segera-perbaiki-jalan-rusak-di-wilayah-aceh-pesisir-penanganan-jalan-ambas-program-2023](https://aceh.tribunnews.com/2022/12/28/bpjn-aceh-segera-perbaiki-jalan-rusak-di-wilayah-aceh-pesisir-penanganan-jalan-ambas-program-2023)
- [13] Pambudi, A. (2013, Juni 2). *96 kampung di Pesisir Selatan belum ada listrik*. Retrieved from [www.antaranews.com: https://www.antaranews.com/berita/377960/96-kampung-di-pesisir-selatan-belum-ada-listrik](https://www.antaranews.com/berita/377960/96-kampung-di-pesisir-selatan-belum-ada-listrik)
- [14] Wijaya, T. (2015, Februari 21). *Nasib Desa di Pesisir Timur Sumatera Selatan: Tanpa Listrik dan Minim Air Bersih*. Retrieved from [www.mongabay.co.id: https://www.mongabay.co.id/2015/02/21/nasib-desa-di-pesisir-timur-sumatera-selatan-tanpa-listrik-dan-minim-air-bersih/](https://www.mongabay.co.id/2015/02/21/nasib-desa-di-pesisir-timur-sumatera-selatan-tanpa-listrik-dan-minim-air-bersih/)
- [15] Ambari, M. (2019, Januari 18). *Kenapa Pembangunan Pesisir Terus Berdampak Negatif?* Retrieved from [www.mongabay.co.id: https://www.mongabay.co.id/2019/01/18/kenapa-pembangunan-pesisir-terus-berdampak-negatif/](https://www.mongabay.co.id/2019/01/18/kenapa-pembangunan-pesisir-terus-berdampak-negatif/)
- [16] Febrianti, A., & Sangkertadi. (2022). PERSEPSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT PESISIR TERHADAP PEMBANGUNAN REKLAMASI DI KAWASAN PANTAI SALEMO KOTA POLOPO, SULAWESI SELATAN. *Publikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*, 22-29.
- [17] Lesmana, A., & Pramudita, Y. (2022, Februari 4). *Korban Penggusuran, Sudah 5 Tahun Negara Abaikan Hak Hidup Masyarakat Pesisir Pantai Merpati*. Retrieved from [www.suara.com: https://www.suara.com/news/2022/02/04/180643/korban-penggusuran-sudah-5-tahun-negara-abaikan-hak-hidup-masyarakat-pesisir-pantai-merpati-bulukumba](https://www.suara.com/news/2022/02/04/180643/korban-penggusuran-sudah-5-tahun-negara-abaikan-hak-hidup-masyarakat-pesisir-pantai-merpati-bulukumba)
- [18] Ambari, M. (2017, Agustus 23). *Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal?* Diambil kembali dari [www.mongabay.co.id: https://www.mongabay.co.id/2017/08/23/kenapa-pembangunan-di-kawasan-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-masih-tertinggal/](https://www.mongabay.co.id/2017/08/23/kenapa-pembangunan-di-kawasan-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-masih-tertinggal/)
- [19] Mustafa, S. (2019, Januari 12). *Kawasan Kumuh Didominasi Wilayah Pesisir*. Retrieved from [korankaltara.com: https://korankaltara.com/kawasan-kumuh-didominasi-wilayah-pesisir](https://korankaltara.com/kawasan-kumuh-didominasi-wilayah-pesisir)
- [20] Wahyu, M., Kiptiah, M., & Nugroho, H. (2016). KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN TANAH LAUT. *Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Jilid 2*, 800-805.
- [21] Christiawan, P., & Budiarta, I. (2017). ENTITAS PERMUKIMAN KUMUH DI WILAYAH PESISIR. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 6, No. 2*, 178-187.
- [22] Maulidah, A., Sujarwo, & Setiawan, B. (2022). Analysis Poverty of Fishermen's Households in The Coastal Area of Ambulu District, Jember Regency. *Habitat, Vol. 33, No. 1*, 93-100.
- [23] Pangaribowo, W. (2019, Agustus 22). *Nelayan Hutang ke Tengkulak, Harga Ikan Dipermainkan*. Retrieved from [jogja.tribunnews.com: https://jogja.tribunnews.com](https://jogja.tribunnews.com)
-

<https://jogja.tribunnews.com/2019/08/22/nelayan-hutang-ke-tengkulak-harga-ikan-dipermainkan>

- [24] Rahmat, Y. (2019, Agustus 21). *Menyoal Pengembangan Pariwisata Pesisir*. Diambil kembali dari sektorpublik.com: <https://sektorpublik.com/baca/menyoal-pengembangan-pariwisata-pesisir>